



PENGUMUMAN
LAPORAN HARTA KEKAYAAN PENYELENGGARA NEGARA
(Tanggal Penyampaian/Jenis Laporan - Tahun: 5 Februari 2025/Periodik - 2024)

Status Verifikasi Administratif Lengkap

BIDANG : EKSEKUTIF
LEMBAGA : BADAN NASIONAL Pencarian dan Pertolongan (BASARNAS)
UNIT KERJA : KEDEPUTIAN BIDANG BINA TENAGA dan POTENSI Pencarian dan
PERTOLONGAN

I. DATA PRIBADI

1. Nama : AGUS HARYONO
2. Jabatan : DIREKTUR BINA POTENSI
3. NHK : 121486

II. DATA HARTA

A. TANAH DAN BANGUNAN **Rp.** **2.952.000.000**

1. Tanah Seluas 2408 m2 di KAB / KOTA ACEH UTARA, WARISAN
Rp. 71.000.000
2. Tanah dan Bangunan Seluas 100 m2/100 m2 di KAB / KOTA
BEKASI, HASIL SENDIRI Rp. 701.000.000
3. Tanah dan Bangunan Seluas 117 m2/70 m2 di KAB / KOTA
KLATEN, HASIL SENDIRI Rp. 235.000.000
4. Tanah dan Bangunan Seluas 191 m2/70 m2 di KAB / KOTA
KLATEN, WARISAN Rp. 383.000.000
5. Tanah dan Bangunan Seluas 2407 m2/100 m2 di KAB / KOTA
ACEH UTARA, HASIL SENDIRI Rp. 61.000.000
6. Tanah dan Bangunan Seluas 88 m2/76 m2 di KAB / KOTA BEKASI,
HASIL SENDIRI Rp. 1.501.000.000

B. ALAT TRANSPORTASI DAN MESIN **Rp.** **125.000.000**

1. MOTOR, HONDA VARIO SEPEDA MOTOR Tahun 2013, HASIL
SENDIRI Rp. 7.000.000
2. MOBIL, TOYOTA RUSH MINIBUS Tahun 2016, HASIL SENDIRI
Rp. 110.000.000
3. MOTOR, HONDA BEAT SOLO Tahun 2021, HADIAH Rp.
8.000.000



C. HARTA BERGERAK LAINNYA

Rp. 20.500.000

D. SURAT BERHARGA

Rp. ----

E. KAS DAN SETARA KAS

Rp. 2.000.000

F. HARTA LAINNYA

Rp. ----

Sub Total

Rp. 3.099.500.000

III. HUTANG

Rp. 451.750.934

IV. TOTAL HARTA KEKAYAAN (II-III)

Rp. 2.647.749.066

Catatan:

1. Rincian harta kekayaan dalam lembar ini merupakan dokumen yang dicetak secara otomatis dari elhkpn.kpk.go.id. Seluruh data dan informasi yang tercantum dalam dokumen ini sesuai dengan LHKPN yang diisi dan dikirimkan sendiri oleh Penyelenggara Negara melalui elhkpn.kpk.go.id, serta tidak dapat dijadikan dasar oleh Penyelenggara Negara yang bersangkutan atau siapapun juga untuk menyatakan bahwa harta kekayaan yang bersangkutan tidak terkait tindak pidana. Apabila dikemudian hari terdapat harta kekayaan milik Penyelenggara Negara dan/atau Keluarganya yang tidak dilaporkan dalam LHKPN, maka Penyelenggara Negara wajib untuk bertanggung jawab sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
2. Pengumuman ini telah ditempatkan dalam media pengumuman resmi KPK dalam rangka memfasilitasi pemenuhan kewajiban Penyelenggara Negara untuk mengumumkan harta kekayaan sesuai dengan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme.
3. Pengumuman ini tidak memerlukan tanda tangan karena dicetak secara otomatis.